



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Halaman : 1293-1300

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA BABOTIN MAEMINA KECAMATAN BABOTIN LEOBELE KABUPATEN
MALAKA**

**Fridolino Stefen Bria, Maria Trifosa Tes, Jeni Selviana Bere, Maria Edelreda
Fitun, Dagunda Tefa, Marlin Walde Klau, Selfridiana S. Kolo**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Timor, Kota Kefamenanu, Indonesia**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2674>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Bria, F. S. ., Trifosa Tes, M. ., Selviana Bere, J. ., Edelreda Fitun, M. ., Tefa, D. ., Walde Klau, M. ., & S. Kolo, S. . (2024). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BABOTIN MAEMINA KECAMATAN BABOTIN LEOBELE KABUPATEN MALAKA. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1293–1300.
<https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2674>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BABOTIN MAEMINA KECAMATAN BABOTIN LOBELE KABUPATEN MALAKA

**Fridolino Stefen Bria¹,
Maria Trifosa Tes², Jeni
Selviana Bere³, Maria
Edelreda Fitun⁴, Dagunda
Tefa⁵, Marlin Walde Klau⁶,
Selfridiana S. Kolo⁷**

1,2,3,4,5,6,7)

**Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, Universitas Timor,
Kota Kefamenanu, Indonesia**

Abstrak

Laporan ini membahas partisipasi politik perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Babotin Maemina, Kecamatan Babotin Leobebe, Kabupaten Malaka. Fokus penelitian adalah rendahnya partisipasi perempuan baik sebagai kandidat maupun pemilih. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian menemukan beberapa faktor yang memengaruhi, seperti norma budaya patriarki, rendahnya pendidikan politik, dan kurangnya kepercayaan diri perempuan. Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, hasilnya tetap menunjukkan dominasi laki-laki sebagai kandidat. Penelitian ini merekomendasikan pemberdayaan politik perempuan melalui program pendidikan politik, pembentukan wadah aspirasi perempuan, dan pelibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan desa untuk meningkatkan kesetaraan gender dan demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Perempuan, Pilkades, Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan.





* Email Korespondensi:
stefenbria008@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 17/12/2024
Diterima : 18/12/2024
Diterbitkan : 19/12/2024

Abstract

This report examines women's political participation in the Village Head Election (Pilkades) in Babotin Maemina Village, Babotin Leobebe Subdistrict, Malaka Regency. The study focuses on the low level of female participation as candidates and voters. Using a qualitative approach, it identifies factors such as patriarchal cultural norms, lack of political education, and low self-confidence among women. Despite governmental socialization efforts, male candidates continue to dominate. The study recommends empowering women politically through political education programs, creating platforms for women's aspirations, and involving women in village policy-making processes to enhance gender equality and local democracy.

Keywords: Political Participation, Women, Pilkades, Gender Equality, Women's Empowerme.

PENDAHULUAN

Partisipasi Politik sebagai tolak ukur untuk mengetahui adanya kualitas kemampuan dalam masyarakat. Partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik dan partisipasi politik berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi jalannya kebijakan umum. Partisipasi politik perempuan semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Partisipasi perempuan di arena publik dan politik merupakan suatu langkah penting untuk membangun kembali kondisi ekonomi, politik dan sosial untuk mencapai persamaan bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan peluang dan mencapai kemajuan. Perempuan mampu mengikuti perkembangan zaman, berfikir dan menyusun strategi bagi kebutuhan mereka sendiri.

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) merupakan salah satu pemilihan pemimpin yang dilaksanakan di tingkat desa sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk menentukan sendiri pemimpin mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peserta pilkades yaitu berasal dari desa setempat minimal satu tahun sebelum pendaftaran. Di dalam Pasal 33 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan persyaratan calon Kepala Desa yaitu tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa tiga kali berturut-turut masa jabatan, usia saat pendaftaran minimal 25 tahun dan minimal pendidikan yaitu SLTP/Sederajat.

"Partisipasi Politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan dari status sosial ekonomi dimasyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintahan bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik"

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum. Instrumen hukum tersebut menghasilkan sensitive gender yang selama ini terabaikan, sehingga menghambat perempuan diberbagai sektor kehidupan. Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum (PEMILU) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan perempuan. Memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam politik yang dimulai dengan keterlibatan langsung dengan cara memasuki perempuan yang lebih besar dalam struktur partai politik.

Kehidupan sosial mengenai gender menjadi kepentingan dan kebutuhan di dalam masyarakat. Kesetaraan gender bukan berarti untuk memunculkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk melengkapi fungsi sosial di masyarakat. Struktur sosial ekonomi masyarakat dipedesaan masih kental bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sehingga ranah perempuan masih dianggap sebagai ruang domestik. Dengan hal itu, partisipasi politik memilih perempuan dalam wujud kontrol desa masih terabaikan. Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah alat dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Kepala Desa menjadi bentuk penyaluran kehendak rakyat diwilayah Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi yang merakyat, yang dimana ajang politik ini dapat dimanfaatkan sebagai pelatihan politik di masyarakat, khususnya bagi perempuan. Pemilihan Kepala Desa lebih spesifik dari pemilu kepala daerah dan lain sebagainya. Karena para kandidat memiliki kedekatan serta dikenal oleh masyarakat yang akan memilihnya. Hal tersebut menyebabkan pendidikan politik di masyarakat masih rendah, kedekatan sering kali diartikan oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya, dalam hal ini pendidikan politik perlu dikembangkan apalagi bagi kaum perempuan. Banyak ditemukan dimasyarakat bahwa perempuan kurang faham

dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah tanpa perlu terlibat dalam aktivitas publik.

Di Desa Babotin Maemina Kecamatan Babotin Leobebe Kabupaten Malaka, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tahun 2023. Tingkat partisipasi perempuan dalam pilkades tersebut sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuh kandidat Kepala Desa Babotin Maemina yang diseleksi menjadi 3 kandidat. Semuanya kandidat laki-laki.

Adapun indikator permasalahan yang di temukan di Desa Babotin Maemina Kecamatan Babotin Leobebe Kabupaten Malaka antara lain, Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pencalonan kepala Desa Tahun 2023 di Desa Babotin Maemina. Hal tersebut di buktikan dengan tidak adanya calon kepala desa perempuan yang mendaftar, Mayoritas perempuan di Desa Babotin kurang percaya diri untuk terlibat dalam kancah politik lokal di tingkat Desa yang berakibat kurangnya penyerapan aspirasi kepentingan kelompok perempuan tersebut. Karena mereka memiliki pandangan bahwa perempuan hanya dapat bekiprah di ranah domestik dan masih dianggap tabu turut serta aktif di ranah politik. Padahal setengah dari populasi penduduk Desa setempat adalah berjenis kelamin perempuan, Pendidikan politik bagi perempuan di Desa Babotin Maemina masih sangat rendah. Hal tersebut di buktikan bahwa kaum perempuan di Desa Babotin Maemina tidak pernah mendapatkan pendidikan politik.

Adapun bentuk – bentuk partisipasi politik menurut Cohen Uphoff dalam Yalvema Miasz (1997:23) adalah sebagai berikut: a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d. Partisipasi dalam evaluasi.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, agar

peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan dan informasi yang ingin di cari. Penelitian yang di kutip oleh Meleong (2017:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena untuk tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, persepsi, dan lain sebagainya, secara historik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan dimanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Esterberg berpendapat bahwa wawancara (2017:231). Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan begitu, wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan untuk mencari informasi kepada panitia pelaksana pengumuman suara pemilihan kepala Desa Babotin Maemina Kecamatan Babotin Leobebe serta tokoh-tokoh masyarakat. Studi kepustakaan yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan atau topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa di Desa Babotin Maemina Menurut perspektif Hanna Arendt.

Partisipasi politik perempuan menurut Hannah Arendt, partisipasi politik perempuan sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Arendt berpendapat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan publik dan harus diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk terlibat dalam politik. Arendt juga berpendapat bahwa perempuan perlu diberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi mereka dalam kehidupan publik. Arendt berpendapat bahwa partisipasi politik perempuan dapat membantu

memperkuat demokrasi dan mempromosikan keadilan sosial.

Dalam perspektif Hannah Arendt, partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa dapat dilihat melalui konsep-konsep utamanya tentang tindakan, ruang publik, dan kekuasaan. Arendt menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam ruang publik sebagai esensi politik, yang tidak hanya terbatas pada laki-laki, tetapi juga berlaku bagi perempuan. Baginya, ruang politik adalah tempat di mana individu bertindak bersama secara bebas untuk membentuk kehidupan bersama.

1. Tindakan (Action): Arendt mendefinisikan tindakan sebagai aktivitas politik paling penting yang melibatkan kebebasan dan pluralitas. Partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa adalah bentuk tindakan politik di mana mereka menggunakan kebebasan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, mempengaruhi keputusan politik, dan mengambil peran aktif dalam masyarakat.

2. Ruang Publik (Public Sphere): Arendt percaya bahwa politik harus terjadi di ruang publik, di mana semua orang, termasuk perempuan, memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung. Pemilihan kepala desa adalah bagian dari ruang publik ini, dan ketika perempuan terlibat, mereka menegaskan keberadaan dan pengakuan mereka dalam proses politik.

3. Kekuasaan (Power): Bagi Arendt, kekuasaan muncul dari tindakan bersama, bukan dari dominasi atau kontrol. Ketika perempuan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, mereka membentuk kekuasaan kolektif bersama anggota masyarakat lainnya. Partisipasi ini bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang membangun kapasitas kolektif untuk mengubah kondisi sosial dan politik.

Faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa dapat dibagi menjadi beberapa kategori, meliputi faktor sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan:

1. Faktor Sosial

Pendidikan: Tingkat pendidikan perempuan seringkali berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi politik. Perempuan yang lebih terdidik cenderung lebih sadar akan hak-hak politik mereka dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang proses pemilihan.

Kesadaran Gender: Tingkat kesadaran gender di masyarakat mempengaruhi bagaimana perempuan dipandang dalam politik. Di komunitas dengan kesadaran gender yang rendah, perempuan mungkin menghadapi stigma atau kurang didukung untuk terlibat dalam politik.

Peran Ganda: Tanggung jawab rumah tangga dan peran domestik yang masih dibebankan pada perempuan sering kali mengurangi waktu dan peluang mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik.

2. Faktor Budaya

Norma dan Nilai Tradisional: Budaya patriarki dan norma tradisional yang membatasi peran perempuan di ruang publik seringkali menjadi penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam pemilihan kepala desa. Dalam beberapa masyarakat, perempuan dianggap tidak layak atau tidak pantas untuk terlibat dalam politik.

Dukungan Keluarga dan Komunitas: Dukungan dari keluarga, terutama dari suami dan orang tua, sangat mempengaruhi keterlibatan politik perempuan. Jika lingkungan terdekat mereka tidak mendukung, perempuan cenderung lebih enggan untuk berpartisipasi.

3. Faktor Ekonomi

Independensi Ekonomi: Perempuan yang memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang lebih baik sering kali lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam politik. Sebaliknya, ketergantungan ekonomi pada laki-laki dapat membatasi kebebasan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Akses ke Sumber Daya Politik: Kampanye politik membutuhkan biaya. Kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya politik seperti dana

kampanye, jaringan politik, dan dukungan materi dapat menghambat partisipasi mereka dalam pemilihan.

4. Faktor Hukum dan Kebijakan

Regulasi dan Kebijakan Gender: Hukum yang mendukung kesetaraan gender, termasuk kuota gender dalam pemilihan, dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. Di beberapa daerah, kebijakan afirmatif action yang memberikan kesempatan lebih bagi perempuan untuk maju sebagai calon kepala desa berpengaruh besar.

Perlindungan dari Diskriminasi: Adanya perlindungan hukum terhadap diskriminasi gender dalam politik juga sangat penting. Jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai, perempuan mungkin menghadapi intimidasi, kekerasan politik, atau pengucilan.

5. Faktor Politik

Akses ke Jaringan Politik: Keterlibatan perempuan dalam jaringan atau organisasi politik, seperti partai politik atau organisasi masyarakat sipil, memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa.

Pengalaman Politik: Pengalaman perempuan dalam politik, baik dalam kegiatan organisasi masyarakat maupun partisipasi di pemerintahan lokal, juga mempengaruhi kesiapan dan kepercayaan diri mereka untuk terlibat dalam politik tingkat desa.

6. Faktor Psikologis

Kepercayaan Diri: Banyak perempuan merasa kurang percaya diri atau merasa bahwa mereka tidak cukup kompeten untuk berpartisipasi dalam politik, terutama jika lingkungan mereka mengajarkan bahwa politik adalah "urusan laki-laki".
Motivasi dan Aspirasi: Motivasi individu dan aspirasi politik pribadi juga mempengaruhi partisipasi perempuan. Mereka yang memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi masyarakat sering kali lebih termotivasi untuk terlibat dalam politik.

Di Desa Babotin Maemina Kecamatan Babotin Leobebe Kabupaten Malaka, pada tahun 2023 melaksanakan pilkades serentak. Pilkades berjalan lancar sebagai mana mestinya. Akan tetapi partisipasi politik perempuan masih sangat rendah, belum ada perempuan yang berani mencalonkan

diri sebagai Kepala Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga kandidat Kepala Desa dari lima Dusun yaitu Dusun Oeleurai A , Oeleurai B, Manukakae, Semata A dan Semata B semuanya laki-laki. Dari tiga kandidat diseleksi menjadi tiga kandidat. Nama-nama kandidat Kepala Desa tersebut yaitu Egiduris Tae, Karlus Un Kiik, dan Yohanes Berchmans Tae . Pelaksanaan Pilkades di Desa Babotin Maemina terbagi kedalam 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara), adapun hasil rekapitulasi penghitungan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Tabel Rekapitulasi pemungutan suara Desa Babotin Maemina Kecamatan Babotin Leobebe Kabupaten Malaka Tahun 2023

No	Nama Kandidat	Hasil Akhir
1.	Egiduris Tae	170
2.	Karlus Un Kiik	155
3.	Yohanes Berchmans Tae	279

Argumentasi pengalaman, dimana perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda baik secara biologis ataupun sosial. Secara umum, laki-laki kurang memiliki inisiatif dalam mengajukan kebijakan yang melayani kepentingan perempuan dan anak. Mereka masih dianggap kurang memiliki kepekaan seperti terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan perempuan dan anak. Pemikiran mendasar inilah yang menjadi alasan pentingnya kehadiran perempuan di ranah politik.

Pemerintah Desa Babotin Maemina telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa, akan tetapi tetap saja yang mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa yaitu laki-laki, berdasarkan pengalaman, bahwa di Desa Babotin Maemina belum pernah ada perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, ini disebabkan karena masyarakat Desa Babotin Maemina kurang mengetahui adanya peranan gender, mereka masih menganggap perempuan hanya di ranah domestik, tanpa terlibat dalam partisipasi politik. Padahal perempuan memiliki potensi menjadi seorang pemimpin dan bisa memberdayakan masyarakat

desa. Peranan gender dimasyarakat sangatlah penting, dalam peranan gender perempuan dan laki laki memiliki kesempatan yang sama baik itu di dalam kehidupan masyarakat bahkan di dunia politik. Maka dengan adanya kesetaraan gender peranan gender akan terbentuk dengan sendirinya di masyarakat, yang dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan hak yang sama. Kesetaraan gender bukanlah ajang kompetisi baik itu perempuan ataupun laki-laki, supaya perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Akan tetapi untuk memiliki kedudukan hak yang sama dan sejajar. Sehingga jika masyarakat Desa Babotin Maemina mengetahui peranan gender maka partisipasi politik pemilihan perempuan akan terwujud.

Argumentasi kepentingan kelompok, dimana perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karenanya laki-laki tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan perempuan. Partisipasi dan keterwakilan politik yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan sebuah prasyarat mendasar, kondisi tersebut merupakan inti dari demokrasi. Demokrasi yang efektif yaitu adanya kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan, kesetaraan dan saling melengkapi satu sama lain. Kehadiran perempuan dalam penguatan sistem demokrasi merupakan Hak Asasi Manusia, bahwa perempuan hadir dalam proses pengambilan keputusan politik. Keterwakilan politik perempuan diperlukan adanya pendidikan politik, tujuan dari pendidikan politik yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Babotin Maemina, ditemukan bahwa kepekaan terhadap situasi politik masih rendah. Hal ini terjadi karena adanya kedekatan antara masyarakat dengan para kandidat Kepala Desa yang akan dipilihnya, tanpa melihat visi misi atau program ke depannya. Hal tersebut jelas bahwa pemilihan berbasis perempuan tidak memilih menurut Kartini Kartono (2006: 36) mengungkapkan bahwa konsepsi

mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu sebagai berikut. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu "Mbawani" atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Maka mereka lebih cenderung menentukan sikap politiknya hanya karena unsur kedekatan. Dalam hal ini pendidikan politik perlu di sosialisasikan lagi apalagi bagi kaum perempuan. Banyak ditemukan dimasyarakat, bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah diranah domestik tanpa terlibat dalam ranah politik.

KESIMPULAN

Partisipasi politik pemilihan perempuan dalam Pilkades Serentak di Desa Babotin Maemina Tahun 2023 belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kandidat calon kepala desa yang mendominasi dalam kontestasi tersebut. Pemerintah Desa Babotin Maemina telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa, akan tetapi tetap saja yang mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa yaitu laki-laki, hal ini disebabkan karena masyarakat perempuan di Desa Babotin Maemina kurang mengetahui adanya peranan gender, mereka masih menganggap perempuan hanya diranah domestik. Pendidikan politik di Desa Babotin Maemina masih rendah dan perlu dikembangkan apalagi kaum perempuan, masyarakat masih menganggap bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah sumur, dapur dan kasur tanpa perlu terlibat dalam ranah politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Mariani, Samirudin T. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Periode 2013-2019. *Selami IPS* 46 (2). 135- 142.
- Kharisma. 2019. Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD). Yogyakarta
- Ahmad, D. & Dinda. A. 2020. Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Moderat* 6 (3) 585-610
- Arendt, Hannah. *On Revolution*. New York: Viking Press, 1963.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.